

**PENINGKATAN PERANAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)  
DALAM MEMBANGUN EKONOMI RAKYAT  
DI KECAMATAN DENPASAR BARAT**

**I GST WAYAN MURJANAYASA  
Fakultas Ekonomi/Ilmu Ekonomi**

**ABSTRACT**

In purpose to improve the knowledge of LPD's stake holders, that include the chief of village association (Prajuru Desa Pakraman), local people, and entrepreneur about the role of LPD in order to empowering people's economic is the reason of this public dedication.

Training is held on Friday, 5<sup>st</sup> October 2007 which took place on the Meeting Room of Denpasar Barat subdistrict office, opened by subdistrict head of Denpasar Barat. This even is participated by management of village association, LPD's management, small and medium scale business entrepreneur in Denpasar Barat District, with number 40 persons.

This event is generally well handled where all audiences are showing the enthusiastic respond along the event due to the ambience is typically more like class session rather than the audience usually hare from government. The program also completed with discussion among the panelists and audience. As mentioned before, by this event the knowledge of LPD's stake holders about the role of LPD in order empowering the people economic could be improved. So, the development in both sides, people economic an LPD's performance will sustainable increased.

Key word: *LPD, small and medium scale business entrepreneur.*

**PENDAHULUAN**

Tiga tragedi beruntun yang melanda perekonomian Indonesia dan Bali khususnya yaitu krisis ekonomi 1997, tragedi Kuta 2002 dan Tragedi Jimbaran 2005 memberi dampak yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi Bali yang banyak bertumpu dari keberhasilan bisnis pariwisata. Kedatangan wisatawan asing yang menurun di tahun 2005 dan 2006 setelah mulai pemulihan di tahun 2004 tidak saja berdampak pada kondisi makro ekonomi, tetapi juga sektor riil khususnya Usaha Kecil Menengah (UKM). UKM yang paling besar terkena dampak adalah yang memiliki keterkaitan, baik langsung niaupun tidak langsung dengan bisnis pariwisata, seperti industri kerajinan, dan industri lainnya yang ada dalam keterkaitan ke depan maupun ke belakang dengan bisnis pariwisata<sup>1</sup>.

---

Dampak keterpurukan ekonomi terhadap UKM memang harus disikapi secara serius. Walaupun UKM hanya mampu menciptakan nilai tambah sebesar 58,3 persen di tahun 2003, namun UKM memberi kontribusi sekitar 99 persen dalam jumlah Badan Usaha di Indonesia serta mempunyai andil 99,45 persen dalam penyerapan tenaga kerja (Brata, 2003). Setidaknya ada tiga alasan yang mendasari mengapa UKM dipandang penting. Pertama, karena kinerja UKM cenderung lebih baik dalam hal amenghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, sebagai bagian dari dinamikanya, UKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui dan perubahan teknologi. Ketiga, diyakini bahwa UKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas ketimbang usaha besar (Berry, dkk., 2001). Dalam beberapa penelitian (lihat misalnya Kuncoro, 2000), UKM juga terbukti telah memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, pertumbuhan unit usaha, dan mendukung pendapatan rumah tangga.

Di masa krisis UKM dikenal sebagai unit usaha yang rentan terhadap krisis karena *local content* dalam industri ini sangat tinggi. Sebagian besar UKM memanfaatkan input yang beasal dari lingkungannya sendiri. Kecilnya penciptaan nilai tambah dalam UKM dibandingkan dengan kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa dua persoalan penting yang dihadapi UKM saat ini adalah kapasitas UKM dan produktivitas UKM. Dewasa ini produktivitas tenaga kerja dalam UKM masih sekitar 0,8 persen produktivitas tenaga kerja usaha besar. Andaikan produktivitas tenaga kerja dalam UKM ini dapat ditingkatkan misalnya menjadi 2 persen saja dari produktivitas usaha besar, maka nilai PDB Indonesia akan meningkat lebih dari 50 persen.

Fakta lain juga menunjukkan bahwa selama ini hanya sedikit sekali usaha mikro bisa berkembang menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah dan seterusnya. Kondisi seperti ini diakibatkan berbagai kendala, baik yang berasal dari kondisi intenal UKM maupun kondisi eksternal yang masih kurang kondusif terhadap muncul dan tumbuh kembang UKM (Anonim, 2004).

Beberapa hambatan internal dalam UKM terkait dengan berbagai persoalan klasik lemahnya SDM kewirausahaan, kontinyuitas input, manajemen, permodalan dan persoalan pemasaran produk. Hambatan permodalan dan SDM menjadi sebab rendahnya kapasitas UKM dan sekaligus juga produktivitas UKM. Namun demikian, hambatan atau kekurangmampuan dalam pemasaran produk juga lebih penting menjadi penghambat ketika modal dan SDM dipandang telah memadai. Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), seperti LPD dan berbagai jenis LKM lainnya (misalnya Koperasi Simpan Pinjam) dapat menjadi salah satu stimulus peningkatan kapasitas UKM.

Perkembangan LKM ini dapat menjadi sumber pembiayaan penting bagi UKM di tengah masih sulitnya kucuraan dana yang berasal dari lembaga keuangan besar. Namun demikian, perkembangan LKM tanpa disertai pengawasan yang memadai justru akan menjadi petaka tidak saja bagi UKM

---

yang memanfaatkan dana LKM, tetapi juga LKM itu sendiri. Praktek pengenaan bunga tinggi dari beberapa jenis LKM akan menjadi bumerang bagi LKM dan UKM. Perhatian yang diberikan dunia perbankan formal untuk UKM juga patut diberi penghargaan, hanya sayang perhatian melalui kucuran permodalan tersebut kurang disertai dengan pengawasan, evaluasi dan pembianan, sehingga kemungkinan kegagalan pengembalian menjadi sangat besar. Bagi dunia usaha perbankan pembiayaan terhadap UKM menjadi relatif kurang menguntungkan, dan kurang efisien, singkatnya menjadi kurang menarik.

Tumbuh kembang UKM sebenarnya tidak terlalu membutuhkan SDM dengan kualitas pendidikan tinggi, justru tumbuhnya UKM karena usaha ini dapat dimasuki oleh tenaga kerja berpendidikan rendah. Namun dalam perkembangannya sumberdaya manusia dalam UKM perlu diberi sentuhan pengetahuan kewirausahaan, sehingga mampu mandiri dalam pemecahan berbagai persoalan yang terkait dengan pengembangan usahanya. Pengetahuan kewirausahaan juga sangat penting diberikan ketika akan memulai suatu usaha.

Secara eksternal hambatan juga terjadi sebagai akibat kurang terintegrasi dan kurang terkoordinasinya berbagai bantuan dan pembinaan yang diberikan terhadap UKM. Akibat bantuan dan pembinaan, pengawasan dan evaluasi yang bersifat parsial ini, berbagai program pembinaan menjadi tumpang tindih dan kurang efisien, yang justru menimbulkan kesan pemanjaan. Dengan berbagai hambatan yang ada pada UKM ini maka perlu upaya serius untuk menumbuhkembangkan usaha tersebut, melalui pemanfaat sumber dana yang ada di wilayah yang sama seperti LPD di wilayah desa pekraman tersebut.

Di Kecamatan Denpasar , beberapa LPD berdiri sejak tahun 1986. Sebagai lembaga ekonomi milik Desa Pekraman, perkembangan LPD di wilayah tersebut juga mengalami perkembangan yang pesat. Data terakhir dari bulan Nopember 2006 sampai dengan bulan Agustus 2007, aktiva LPD tumbuh sekitar 22, 35 persen, dana masyarakat meningkat 25,38 persen, modal dan cadangan meningkat 19,66 persen dan keuntungan meningkat 9,13 persen selama 9 bulan, seperti yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan LPD di Kecamatan Denpasar Barat, tahun 2006 dan 2007

Uraian	Nopember 2006 (Rp juta)	Agustus 2007 (Rp juta)	Pertumbuhan (%)
Aktiva	54.139	66.240	22,35
Dana di BPD	13.322	21.023	57,80
Saldo Pinjaman	40.895	45.175	10,47
Dana Masyarakat	39.171	49.112	25,38
Modal & Cadangan	11.217	13.422	19,66
Keuntungan	3.145	2.496	9,13 *

Sumber: BPD Bali, 2007

Hal yang menarik dari Tabel 1 tersebut adalah dana yang disimpan di BPD yang umumnya disebut uang beku (*idle money*) terus meningkat, dan

mencapai Rp 21,023 milyar pada tahun 2006, atau dengan kenaikan sekitar 60 persen hanya dalam waktu 9 bulan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa LPD-LPD di Kecamatan Denpasar Barat tidak mampu menyalurkan kredit secara optimal kepada masyarakatnya, atau dengan kata lain pihak masyarakat tidak mampu memanfaatkan dana yang tersedia. Adanya selisih yang sangat besar antara bunga simpanan LPD di BPD dengan tingkat bunga yang dibebankan LPD kepada nasabah, yaitu 6 persen berbanding 21 persen pertahun, kiranya masih dimungkinkan dicarikan solusi yang lebih bijaksana yang sama-sama menguntungkan LPD dan nasabah. Sesuai dengan teori elastisitas, yaitu dengan menurunkan tingkat bunga yang relatif kecil, dengan asumsi faktor lainnya tetap, maka akan dapat meningkatkan permintaan kredit sehingga dapat menggairahkan berkembangnya perekonomian rakyat.

Berdasarkan keadaan itulah maka dapat dirumuskan: “Bagaimana pemahaman *stake holders* (pengurus, pengawas, dan nasabah) LPD terhadap usaha untuk menumbuh-kembangkan UKM di Kecamatan Denpasar Barat.”

Ada beberapa tujuan dari pengabdian masyarakat ini, antara lain :

- a. Untuk menyampaikan peranan UKM dalam perekonomian dan permasalahan umum dihadapinya, serta kebijakan-kebijakan yang mungkin dapat dilakukan LPD untuk ikut mengembangkan UKM di Kecamatan Denpasar Barat.
- b. Untuk lebih mendekatkan diri sebagai insan akademis dari suatu perguruan tinggi FE-Unud Denpasar kepada masyarakat dan sekaligus mengadakan penyesuaian pendidikan di perguruan tinggi dengan tuntutan pembangunan masyarakat desa, di desa tersebut di atas.
- c. Untuk membantu pemerintah dalam mempercepat pengembangan sektor UKM di Kecamatan Denpasar Barat.

Sedangkan manfaat dari pengabdian masyarakat ini, adalah sebagai berikut:

- a. Bagi dosen, pengabdian masyarakat ini akan memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan pola pemikiran yang tadinya masih bersifat akademis menjadi lebih bersifat realistik yang mana dapat diperoleh dari masyarakat di desa lokasi pengabdian masyarakat dijalankan.
- a. Bagi Fakultas Ekonomi, sebagai lembaga penyelenggara pendidikan, pengabdian masyarakat ini bermanfaat bagi staf dosen khususnya dalam bentuk perolehan tambahan kasus dari sektor UKM yang dalam dunia pendidikan tidak pernah diperoleh. Dan dalam kesempatan ini bagi pelaku pengabdian masyarakat akan dirangsang untuk mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi sektor UKM ini secara lebih ilmiah.
- d. Bagi masyarakat di mana pengabdian masyarakat ini dilaksanakan, mereka akan memperoleh manfaat berupa masukan (*input*) yang positif di dalam upaya menumbuhkembangkan sektor UKM secara konseptual yang dapat

diterapkan dalam masalah yang dihadapi pengusaha UKM secara lebih realistis.

## METODE PEMECAHAN MASALAH

Penyuluhan ini diselenggarakan dengan metode ceramah atau tatap muka langsung dengan peserta, dengan bantuan sarana LCD proyektor dan *hand out*. Setelah diadakan ceramah, kemudian dilanjutkan dengan acara tanya jawab atau diskusi dengan peserta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi mengenai hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilihat dari dua segi. Pertama, dilihat dari tingkat kehadiran peserta dibandingkan dengan undangan yang dijalankan, serta ketekunan atau keseriusan peserta dalam mendengarkan materi yang diceramahkan. Kedua, evaluasi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh para peserta untuk mencermati dan menanyakan materi yang diceramahkan.

Dr. I G W Murjanayasa, SE., MSi dengan materi : *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kota Denpasar*, pada intinya mengemukakan perlunya pemberdayaan UKM. Sebab UKM memiliki berbagai keunggulan terutama dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas usaha, pemanfaatan bahan baku local, dan lain sebagainya. Peran lembaga keuangan mikro (LKM), sangat diperlukan dalam pengembangan UKM, karena beberapa studi menunjukkan bahwa masalah klasik yang masih dihadapi oleh UKM adalah masalah permodalan dalam mengembangkan usahanya.

Materi ceramah yang diberikan oleh Dr. Made Suyana Utama, SE., MS., dengan materi: *Strategi Peningkatan Peran LPD dalam Rangka Pemberdayaan UMKM* mengingatkan kepada para peserta masih ada peluang yang dapat dilakukan oleh LPD untuk ikut memberdayakan pengembangan UKM, khususnya di wilayah Desa Pekraman. Mengingat LPD dikelola oleh Desa Pekraman, dan pemilik dan nasabah adalah karma desa, beberapa cara dapat ditempuh untuk mengembangkan UKM sekaligus mengembangkan LPD. Beberapa strategi dapat dilakukan antara lain dengan meringankan suku bunga, mempermudah prosedur pinjaman dan meningkatkan pelayanan, maka LPD akan mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya dalam menyediakan permodalan bagi UKM. Dengan demikian UKM yang ada wilayah tersebut akan berkembang. Dengan adanya jalinan yang bagus antara LPD dan UKM, maka LPD ikut berkembang dengan berkembangnya LPD. Ceramah ini juga diakhiri dengan diskusi yang hangat mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta, antara lain dari pengurus LPD yang dibayangi resiko semakin membengkaknya *idle money*, dan juga dari peserta lainnya mewakili kepentingan nasabah.

Dalam usaha pengembangan UKM sebenarnya LPD di Kecamatan Denpasar Barat telah banyak memberikan pinjaman, seperti yang diuraikan pada bagian pendahuluan. Namun suku bunga relative tinggi, yaitu 1,75 persen per bulan, yang mana lebih tinggi dari suku bunga pinjaman pada bank-bank umum. Pemberian pinjaman dengan nilai pinjaman di atas satu juta rupiah, nasabah diwajibkan untuk menyerahkan jaminan untuk meminimalkan resiko. Sampai saat ini pinjaman yang diberikan hanya kepada krama Desa Pekraman, dengan mewajibkan menyertakan jaminan apabila pinjamannya satu juta rupiah atau lebih. Tim pengabdian menganjurkan agar peminjam diperluas kepada masyarakat bukan krama, tetapi beromisili di Kecamatan Denpasar Barat dengan tetap memperhatikan kriteria teknis perbankan, yaitu 5 C (Character, Capacity, Collateral, Capital, dan Condition) serta 4 P (personality, Prospect, Porpuse, dan Payment).

Salah seorang prajuru Desa Pekraman menanyakan bagaimana caranya menyelesaikan kredit macet? Tim pengabdian menganjurkan agar penanganan kredit macet dilakukan secara persuasif dan memusyawarahkan dengan krama, karena LPD merupakan lembaga ekonomi Desa Pekraman yang dibentuk dari krama untuk kepentingan krama.

Tim pengabdian mengingatkan kepada para *stake holder*, bahwa pengembangan ekonomi rakyat dapat dilakukan apabila adaya sinerji antara LPD dengan masyarakat Desa pekraman dalam hal ini krama, masyarakat membangun atau mengembangkan kegiatan usahanya, LPD menyediakan modal. Adanya kerjasama yang baik antara masyarakat atau dunia usaha akan dapat meningkatkan kinerja LPD yang sekaligus juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Penataran peningkatan peran LPD dalam membangun ekonomi rakyat di Kecamatan Denpasar Barat bertujuan agar peserta mendapatkan pengetahuan peran UKM dalam perekonomian dan mengerti mengenai peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan pengurus LPD dan jajarannya untuk mengembangkan UKM di Kecamatan Denpasar Barat.

Penataran ini mendapat perhatian yang serius dari para peserta, mengingat sulitnya lapangan kerja formal bagi generasi muda, dan di lain pihak LPD dibayangi oleh kesulitan menyalurkan dana karena semakin membengkaknya *idle money*.

### Saran.

Respon peserta terhadap materi yang diceramahkan cukup tinggi, tetapi hal ini belumlah menjamin akan meningkatnya UKM di wilayah pengabdian secara signifikan dalam waktu yang singkat, karena pengembangan UKM dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh karena itu ke depan dipandang perlu untuk mengadakan pendataan mengenai potensi dan masalah-masalah konkrit yang dihadapi UKM di Kecamatan Denpasar Barat, untuk mendapatkan bimbingan teknis lebih intensif.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas Udayana atas dukungan dana sehingga kegiatan ini dapat berlangsung. Demikian juga kepada segenap pengurus LPD Kecamatan Denpasar Barat yang menjadi khalayak sasaran kegiatan pengabdian ini, kami mengucapkan terimakasih. Selanjutnya kepada semua pihak yang ikut memberi dukungan terhadap kelancaran kegiatan ini kami mengucapkan terimakasih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brata, A. G. 2003. Distribusi Spasial UKM di Masa Krisis Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Th. I No. 8.
- Berry, A. E., Rodriquez, dan H. Sandeem. 2001. Smalland Medium Enterprises Dynamic in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 37 (3): 201-222.
- Kuncoro, M. 2002. *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. Yogyakarta: UPP YMP YKPN.

Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.